Refleksi Mobilitas Bandung 2025: Mengayuh, Melangkah dan Bergerak Untuk Kota yang Lebih Adil

Category: News
20 Desember 2025

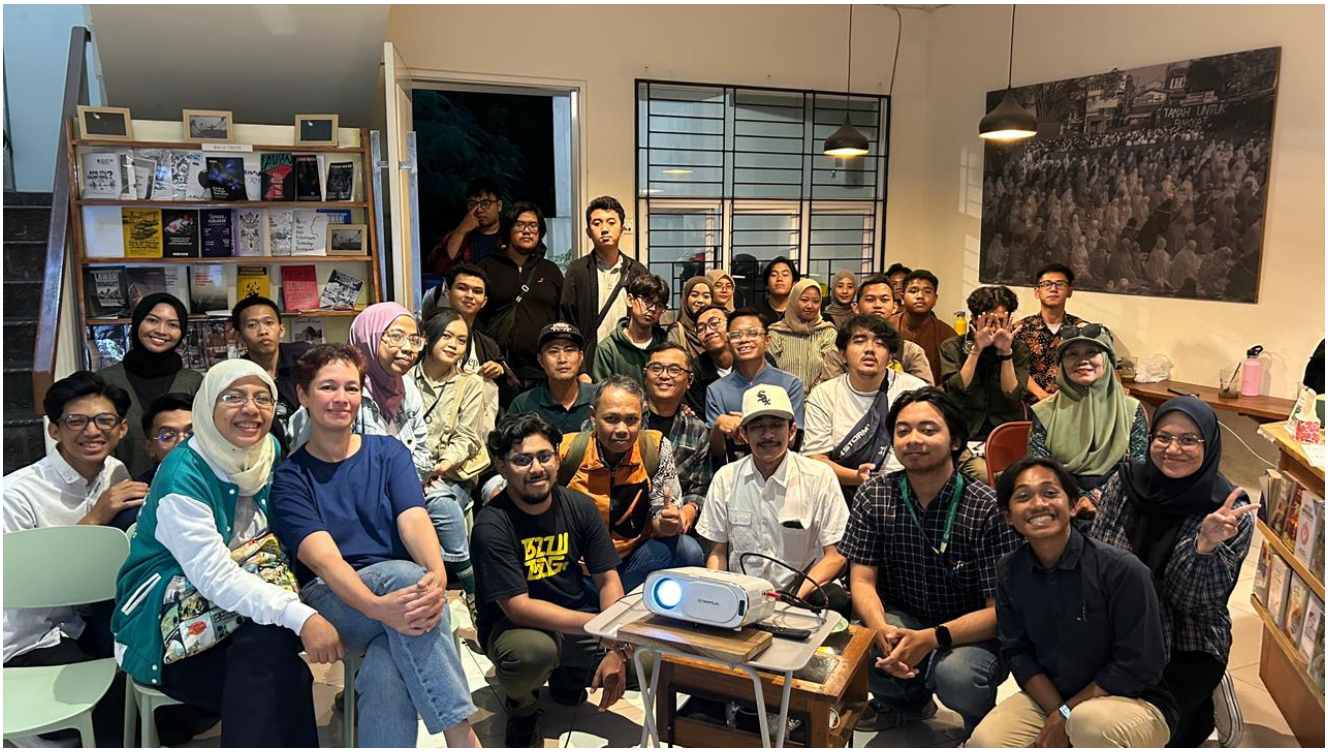

Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan

BANDUNG, Prolite – Sejumlah komunitas dan inisiatif warga yang concern pada isu mobilitas kota berkumpul dalam agenda Refleksi Mobilitas Kota Bandung 2025 yang diselenggarakan bersama media Bandung Bergerak di Perpustakaan Bunga di Tembok, Jumat sore (19/12). Kegiatan ini digagas oleh Bike to Work Bandung bersama Koalisi Pejalan Kaki Bandung, Transport for Bandung dan Bandung Bergerak.

Forum refleksi ini menjadi ruang bersama untuk membaca ulang kondisi mobilitas Kota Bandung sepanjang tahun 2025, khususnya dari perspektif pengguna jalan yang paling rentan: pejalan

kaki, pesepeda, dan pengguna transportasi publik.

Sepanjang diskusi, peserta menyoroti kondisi fasilitas pendukung bagi pejalan kaki dan pesepeda yang masih minim, tidak layak, terputus, dan dalam banyak kasus mengalami kerusakan atau terbengkalai. Trotoar dan jalur sepeda kerap tidak berfungsi sebagaimana mestinya akibat alih fungsi, parkir kendaraan bermotor, pelaku UKM, maupun kurangnya perawatan. Situasi ini mencerminkan masih kuatnya dominasi kendaraan bermotor dalam perencanaan dan pengelolaan ruang jalan, sehingga berdampak langsung pada rendahnya rasa aman bagi warga yang berjalan kaki dan bersepeda. Meski Kota Bandung telah memiliki regulasi seperti Peraturan Wali Kota Nomor 47 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Fasilitas Pendukung Pesepeda, implementasinya di lapangan dinilai belum konsisten dan belum sepenuhnya berpihak pada perlindungan pengguna jalan rentan.

“Refleksi ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi diuji melalui praktik di ruang jalan sehari-hari,” ujar Andi, perwakilan Bike to Work Bandung dalam forum tersebut. Ia menegaskan bahwa keselamatan tidak cukup diukur dari angka kecelakaan semata, melainkan dari pengalaman konkret warga—mulai dari kondisi fasilitas pendukung yang layak, kesinambungan jalur, hingga rasa aman dan aksesibilitas bagi pejalan kaki dan pesepeda dalam melakukan perjalanan harian.

Koalisi Pejalan Kaki Bandung menyoroti kondisi trotoar yang masih kerap terputus, digunakan untuk parkir, atau tidak ramah bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas. Sementara Transport for Bandung menekankan perlunya integrasi yang lebih serius antara transportasi publik

dengan moda berjalan kaki dan bersepeda, agar mobilitas ramah lingkungan benar-benar menjadi pilihan utama warga.

Melalui forum ini, ketiga inisiatif warga sepakat untuk memperkuat Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan, sebagai ruang advokasi bersama yang mendorong kota lebih berpihak pada manusia dan lingkungan yang hijau, bukan semata pada mesin yang berdampak pada kondisi udara kotor dan pencemaran lingkungan lainnya.

Diskusi ini menghasilkan empat catatan reflektif utama: pentingnya legitimasi keselamatan yang berpihak pada pejalan kaki, pesepeda dan pengguna transportasi public melalui pembentukan Peraturan Daerah Kota Bandung, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Mobilitas Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan, evaluasi nyata implementasi regulasi pejalan kaki (termasuk pengguna transportasi publik) dan pesepeda, integrasi infrastruktur mobilitas harian, serta penguatan kerja kolektif antargerakan warga kota/kabupaten terkait literasi yang memadai soal mobilitas ramah lingkungan dengan memperhatikan aspek lingkungan, sosial, budaya, ekonomi serta politik yang berpihak pada kepentingan bersama.

Forum ditutup dengan penegasan bahwa perubahan sistem dan tata kelola mobilitas kota tidak lahir dari satu kebijakan atau satu aktor, melainkan dari keberanian untuk terus belajar dan bergerak bersama antara pemangku kebijakan pihak eksekutif dan legislatif bersama masyarakatnya.

Koalisi Mobilitas Ramah Lingkungan Berkelanjutan akan melanjutkan upaya ke depan terkait regulasi yang berpihak pada mobilitas ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi yang akan melibatkan anggota DPRD Kota Bandung, Dinas Perhubungan Kota Bandung dan OPD kota Bandung beserta masyarakat pengguna jalan raya di kedai Kopi Celah Kota, Jalan Buahbatu (Pujasera 1/1 sebelah BTN Cabang Buahbatu), kota Bandung, pada tanggal 27 Desember 2025. Kami mengundang seluruh komunitas pesepeda, komunitas pejalan kaki serta pengguna transportasi public di kota Bandung untuk membincangkan regulasi yang berpihak kepada pengguna jalan raya yang rentan saat ini; pejalan kaki dan pesepeda.

Bluebird Hadir dengan Promo Spesial : Bayar Pakai QRIS OCTO dan Dapatkan Cashback 20%!

Category: Bisnis
20 Desember 2025

Prolite – Yuk Simak Syarat dan Ketentuan Promo Bluebird dengan QRIS OCTO! Cashback 20% untuk Perjalanan Lebih Hemat!

Siapa yang nggak suka perjalanan hemat? Kini ada kabar gembira buat kamu pengguna OCTO Mobile! Mulai sekarang, perjalananmu dengan Bluebird bisa lebih menyenangkan dan murah berkat promo spesial ini.

Bayangkan, cashback 20% setiap kali kamu bayar dengan QR OCTO Mobile—cuma di Bluebird dan Silverbird!

Jadi, daripada khawatir tagihan membengkak, yuk, simak semua detail promo ini dan rasakan sendiri kemudahan serta keuntungan dari setiap perjalananmu!

Apa Saja Syarat dan Ketentuan Promo Ini?

Ilustrasi – indotel

- **Berlaku Hingga 31 Agustus 2024**: Promo ini hanya berlaku hingga akhir bulan Agustus, jadi jangan sampai kelewatan!
- **Untuk Pengguna OCTO Mobile**: Hanya pengguna OCTO Mobile yang bisa menikmati cashback ini.
- **Cashback 20% Maksimal Rp** : Setiap kali transaksi menggunakan QR OCTO Mobile, kamu bisa mendapatkan cashback 20% dengan maksimal Rp .

Kapan dan Berapa Sering Bisa Dapat Cashback?

- **Satu Kali Cashback Per Hari**: Kamu bisa mendapatkan cashback satu kali per hari.
- **Dua Kali Cashback Per Minggu**: Maksimal dua kali cashback dalam seminggu.
- **Dua Kali Cashback Per Bulan**: Selama periode promo, kamu bisa mendapatkan cashback hingga dua kali sebulan.

Cashback akan dikirim ke rekening OCTO Mobile kamu dalam waktu 1×24 jam setelah transaksi.

Syarat Transaksi

Berikut adalah syarat minimal transaksi untuk mendapatkan cashback di berbagai kota:

- **Bandung, Semarang, Makassar, Yogyakarta**: Rp
- **Cilegon, Surabaya, Lombok, Manado, Palembang, Padang, Pekanbaru, Batam**: Rp
- **Jakarta dan Medan**: Rp
- **Bali, Bangka Belitung**: Rp
- **Silverbird**: Rp
- **EZPay Bluebird**: Rp
- **EZPay Silverbird**: Rp

Jangan khawatir, promo ini juga berlaku untuk pemakaian langsung. Untuk Bluebird, minimal transaksi Rp , dan untuk Silverbird, minimal Rp .

Cara Nikmati Promo Ini

- **Pesan Melalui Aplikasi MyBluebird**: Pastikan pemesanan dilakukan melalui aplikasi MyBluebird.
- **Bayar Menggunakan QR OCTO Mobile**: Pilih opsi pembayaran dengan QR OCTO Mobile untuk mendapatkan cashback.

Jadi, jangan sampai ketinggalan kesempatan emas ini untuk menghemat setiap perjalananmu.

Manfaatkan promo ini sebelum 31 Agustus 2024 dan rasakan sendiri betapa mudahnya berhemat sambil tetap menikmati layanan yang terpercaya.

Selamat menikmati perjalanan hemat dan nyaman dengan Bluebird dan OCTO Mobile! □□□

Kemacetan Meningkat: Kota Bandung Harus Siap Hadapi Ancaman Macet Total pada 2037

Category: Daerah
20 Desember 2025

BANDUNG, Prolite – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dengan tegas menyatakan bahwa kawasan Bandung Raya menghadapi ancaman serius akan kemacetan total pada tahun 2037.

Beliau mengaitkan masalah ini dengan tren meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor setiap tahun, yang sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan infrastruktur jalan yang memadai.

Permasalahan tersebut semakin diperparah dengan fakta bahwa saat ini Kota Bandung telah melampaui tingkat kemacetan yang terjadi di DKI Jakarta, sebuah peringkat yang menunjukkan tingkat kepadatan lalu lintas yang mengkhawatirkan

Kota Bandung Mendapat Predikat Kota Ter-Macet di Indonesia

cr. kilasbandungnews

Dalam peringkat kemacetan, Kota Bandung telah mengambil peringkat yang lebih tinggi daripada DKI Jakarta yang duduk di posisi ke-17. Ibu Kota Jawa Barat ini mendapat predikat kota paling macet di Indonesia dan menduduki posisi ke-14 di dunia.

Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Bandung kini menghadapi tantangan kemacetan yang lebih kompleks daripada ibu kota negara, Jakarta.

Populasi penduduk Kota Bandung sendiri kini mencapai 2,4 juta individu, sementara jumlah kendaraan yang beredar mencapai 2,2 juta unit. Secara matematis, perbandingan satu banding satu tercipta di mana setiap warga kota rata-rata memiliki satu kendaraan.

Penyajian ini menggambarkan dinamika yang mencolok di tengah hiruk-pikuk keseharian kota ini. Lebih rinci, dari total kendaraan yang ada, sebanyak 1,7 juta unit diantaranya adalah sepeda motor, sementara sisanya terdiri dari 500 ribu kendaraan lainnya.

Data ini menggambarkan betapa tingginya ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor, terutama sepeda motor, dalam menjalani aktivitas sehari-hari di tengah kota yang semakin padat.

Keadaan ini pun jelas mengindikasikan tingkat kesulitan dan urgensi yang harus segera diatasi untuk memastikan masa depan lalu lintas di kawasan Bandung Raya dapat diatasi dengan efektif.

Bahkan Ridwan Kamil juga menegaskan ini merupakan tingkat

eskalasi masalah yang serius dan mendesak. Menurutnya, jika tidak ada tindakan yang segera dilakukan untuk menangani masalah ini, maka seluruh wilayah di dalam kota akan menghadapi kondisi kemacetan yang parah, bahkan mencapai tingkat macet total.

Lalu Bagaimana Solusi dari Pemerintah Terkait Kemacetan Ini?

Cr. kompas

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, telah mengadakan rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo untuk membahas Rencana Transportasi Massal di Cekungan Bandung Raya.

Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah kemacetan di wilayah tersebut melalui pengembangan sistem transportasi massal yang efisien dan berkelanjutan.

Pihaknya menyebut ada lima solusi yang tengah disiapkan pemerintah untuk mengatasi hal tersebut. Gubernur Ridwan Kamil telah secara rinci memaparkan dua dari solusi-solusi tersebut.

Pertama, ia menyoroti pentingnya pengelolaan transportasi di wilayah Cekungan Bandung. Lalu, pihaknya juga tengah mempersiapkan moda transportasi massal berupa cable car.

Adapun wilayah Cekungan Bandung, yang mencakup Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, dan 5 kecamatan di Kabupaten Sumedang.

Dalam usahanya mengatasi permasalahan ini, Gubernur Jawa Barat merancang solusi melalui pendirian Badan Pengelola Cekungan Bandung. Salah satu strategi utama yang diusulkan adalah

pembangunan infrastruktur transportasi modern, seperti Bus Rapid Transit (BRT) dan sistem kereta gantung.

"Pada awalnya, BRT diajukan sebagai solusi. Namun, mengingat banyaknya warga Bandung yang tinggal di daerah perbukitan, cable car tampaknya menjadi pilihan terbaik," ungkapnya.

Solusi ini bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan transportasi publik yang efisien dan nyaman bagi warga, dengan harapan dapat mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi yang merupakan salah satu penyebab utama kemacetan.

Pentingnya transportasi publik dalam mengurangi kemacetan di Kota Bandung menjadi poin sentral dalam rencana ini. Kekurangan pilihan transportasi publik yang layak dan nyaman seringkali mendorong masyarakat untuk lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi.

Dengan adanya solusi transportasi massal yang lebih efektif dan terjangkau, diharapkan masyarakat akan lebih tertarik untuk beralih menggunakan transportasi publik, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi kemacetan dan dampak negatif lainnya terutama di wilayah Cekungan Bandung.

Diperlukan Setidaknya Lebih dari Rp100 Triliun Untuk Menyelesaikan Masalah

Cr. Milenianews

Ridwan Kamil menyatakan bahwa salah satu dari gagasan solusi transportasi yang telah dipersiapkan akan disampaikan dalam sebuah presentasi kepada Presiden Joko Widodo pada akhir bulan ini.

Dalam kesempatan tersebut, pihaknya bertekad untuk meminta

masukan Presiden mengenai gagasan mana yang paling dapat diimplementasikan dengan mudah.

“Sehingga di masa Presiden Jokowi, ada satu dua transportasi publik di Bandung Raya yang bisa diselesaikan.” imbuh Ridwan Kamil.

Pentingnya dukungan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam proyek transportasi massal ini diakui sangat penting oleh Ridwan.

Menurutnya, sumber dana dari APBD provinsi dan kota/kabupaten tidak akan mencukupi untuk membiayai pembangunan fasilitas transportasi yang skala besar seperti ini.

Menurut perhitungan Ridwan Kamil, diperlukan setidaknya lebih dari Rp100 triliun untuk menyelesaikan masalah transportasi di wilayah Bandung Raya. Angka tersebut mencakup target untuk meningkatkan persentase warga Bandung yang menggunakan transportasi umum dari 13% menjadi 50%.

“Kami akui anggaran daerah tak pernah bisa cukup untuk membiayai proyek semacam ini,” ujarnya.